

TESIS

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA**

*ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF REGIONAL
GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
NORTH TORAJA DISTRICT*

Disusun dan diajukan oleh

**DESI PANGALINAN
A042182016**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



Optimization Software:
www.balesio.com

TESIS

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh :

DESI PANGALINAN
A042182016

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
Pada tanggal 9 September 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasehat,

Ketua

Prof. Dr. Mediaty, S.E., A.k., M.Si., C.A.

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah

Anggota

Dr. Nirwana, S.E., S.k., M.Si., C.A.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Mediaty, S.E., A.k., M.Si., C.A.

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESI PANGALINAN
NIM : A042182016
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, September 2020

Yang membuat pernyataan,



DESI PANGALINAN



PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA dan Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA, Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Kalatiku Paembonan, SE., M.Si, Bupati Toraja Utara yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si, Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian

ni.

Dr. Muhammad Asdar, SE., M.Si, Prof. Dr. Rahmatiah, SE, MA, dan Dr.



Sumardi, SE., M.Si., Tim Penilai Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.

7. Teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah kelas Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal, dan penyelesaian tesis ini.
8. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya.

Penulis

Desi Pangalinan



ABSTRAK

DESI PANGALINAN. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Dibimbing oleh Mediaty dan Nirwana)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pengaruh independensi audit internal, pengaruh komitmen organisasi, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD Kabupaten Toraja Utara.

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dokumentasi dan literatur dimana data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan model regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*) untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data penelitian diolah dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan sistem pengendalian intern akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah demikian pula sebaliknya penurunan sistem pengendalian intern akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, perbaikan kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah demikian pula sebaliknya penurunan kompetensi sumber daya manusia akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan independensi audit internal akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah demikian pula sebaliknya penurunan independensi audit internal akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, perbaikan komitmen organisasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, demikian pula sebaliknya penurunan komitmen organisasi akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kualitas, pengendalian internal, kompetensi, Pemerintah Daerah.



ABSTRACT

DESI PANGALINAN. Analysis of Factors Affecting the Quality of Local Government Financial Statements of North Toraja Regency (Supervised by **Mediaty** and **Nirwana**)

This study aims to analyze the influence of the internal control system, human resource competence, the influence of internal audit independence, the effect of organizational commitment, the effect of the use of information technology on the quality of LKPD in North Toraja Regency.

Data were collected using questionnaires, interviews, documentation, and literature where the data collected were analyzed using multiple linear regression models (Multiple Regression Analysis) to see the effect of independent variables on the dependent variable. The research data were processed using the SPSS program.

The results show that the improvement of the internal control system will improve the quality of local government financial reports and vice versa, the decline in the internal control system will reduce the quality of local government financial reports, the improvement of human resource competence will improve the quality of local government financial reports and vice versa decrease the competence of human resources. will reduce the quality of local government financial reports, increase the independence of internal audit will improve the quality of local government financial reports and vice versa, decrease the independence of internal audits will reduce the quality of local government financial reports, improved organizational commitment will improve the quality of local government financial reports, and vice versa decrease in commitment the organization will reduce the quality of local government financial reports, increasing the use of information technology will improve the quality of reports local government finances.

Keywords: Quality, internal control, competence, local government.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
PERNYATAAN KEASLIAN	III
PRAKATA	IV
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VII
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	7
2.1 Tinjauan Teoritis	7
2.1.1 Teori Keagenan	7
2.1.2 Teori Kelembagaan	8
2.1.3 Sistem Pengendalian Intern	9
2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia	11
2.1.5 Independensi Audit Internal	13
2.1.6 Komitmen Organisasi	13
2.1.7 Pemanfaatan Teknologi Informasi	14
2.1.8 Kualitas Laporan Keuangan Daerah	17
2.2 Penelitian Terdahulu	19
BAB III KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS	21
3.1 Kerangka Pikir	21
3.1.1 Hipotesis Penelitian	21
METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	23



4.2 Populasi dan Sampel	23
4.3 Jenis dan Sumber Data	23
4.4 Metode Pengumpulan Data	24
4.5 Metode Analisis	25
4.5.1 Model Analisis Regresi Berganda	25
4.5.2 Teknik Analisis	26
4.6 Definisi Operasional Variabel	27
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	35
5.1 Analisis Hasil Penelitian	35
5.1.1. Uji Validitas dan Reliabilitas	36
5.1.2. Karakteristik Responden	39
5.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian	43
5.1.5. Uji Analisis Regresi Linear Berganda	72
5.1.5. Uji Asumsi Klasik	75
5.1.6. Pengujian Hipotesis	80
5.2. Pembahasan Hasil Penelitian	90
5.2.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	90
5.2.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	94
5.2.3. Pengaruh Independensi Audit Internal Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan	97
5.2.4. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	100
5.2.5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	103
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	106
6.1. Simpulan	106
6.2. Saran	107
R PUSTAKA	108



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Variabel Penelitian	30
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	23
--	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rendahnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia masih menjadi perhatian dikalangan akademisi dan praktisi. Udayanti dan Ariyanto (2014) mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), buruknya sistem pengendalian intern serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf menentukan kualitas LKPD. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Semester II tahun 2018 menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan lemahnya sistem pengendalian intern. Terdapat 100 kasus kelemahan sistem pengendalian intern Kabupaten atau Kota di Indonesia dengan beberapa masalah antara lain pencatatan belum akurat (46 kasus), Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak lengkap (18 kasus) dan lain-lain kelemahan SPI (36 kasus).

Otonomi daerah menuntut secara tidak langsung pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan tepat. Pemerintah daerah diwajibkan bertanggungjawab dan terbuka kepada masyarakat dalam penyampaian LKPD (Cherina, 2018). Tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi terhadap manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

Upaya pemerintah untuk mengetahui apakah LKPD yang disajikan telah disajikan dengan wajar dan berkualitas, setiap tahunnya diperiksa oleh Badan



Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). BPK kemudian mengeluarkan opini yang merupakan hasil penilaian atas kualitas LKPD. Terdapat 4 (empat) opini yang diberikan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini tertinggi yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan berkualitas adalah opini WTP. Opini WTP terhadap laporan keuangan dapat menaikkan tingkat keyakinan yang tinggi untuk mempercayai informasi LKPD.

Beberapa tahun terakhir ini, Kabupaten Toraja Utara kembali memperoleh predikat opini WTP dari BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan (lihat Rakyatku News, 2019). Opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara secara konsisten selama empat (4) tahun berturut-turut menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya seperti (Ratmono, 2019; Tambingon dkk., 2018; Anggriawan dan Yudianto, 2018; Sudiarianti, 2015) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD antara lain sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) melalui sistem pengendalian intern merupakan faktor yang berperan penting dalam penyajian laporan keuangan. Alasannya bahwa sistem pengendalian intern mampu memberikan informasi akuntansi kepada para pengguna tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan informasi tersebut jelas, konsisten dan dapat dipercaya. Sistem

endalian intern merupakan landasan bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan



keuangan (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Ratmono (2019), kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Sumber daya yang berkompeten mampu memahami logika akuntansi yang ada, dan bisa lebih efisien dan efektif dalam menyusun laporan keuangan. Sumber daya manusia yang berkompeten diperlukan guna melaksanakan pengelolaan yang baik, memiliki pengalaman dalam bidang keuangan serta sering mengikuti pendidikan dan pelatihan. Menurut Ratmono (2019), kurangnya kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi relevansi laporan keuangan yang dihasilkan.

Selain itu, kualitas laporan keuangan juga ditentukan oleh independensi audit internal. Audit internal merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Independensi audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan dan pengelolaan organisasi (Tambingon dkk., 2018).

Komitmen organisasi (*organization commitment*) juga menentukan kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi merupakan kemampuan dan kemauan

menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan sasaran organisasi. Menurut Anggriawan dan Yudianto (2018) komitmen organisasi



cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan perilaku. Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi dan rasa kesetiaan kepada organisasi. Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat.

Terakhir faktor yang menentukan kualitas LKPD yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat. Kemajuan teknologi sekarang ini, membuat instansi-instansi pemerintah sudah mulai meninggalkan sistem manual, beralih ke sistem komputer. Namun yang menjadi kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana.

Teknologi saat ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global (Sudiarianti, 2015). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, database, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi

untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu



komponen dari teknologi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Sudiarianti, 2015).

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, penelitian ini akan menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Toraja Utara.
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Toraja Utara.
3. Apakah independensi audit internal memiliki pengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Toraja Utara.
4. Apakah komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Toraja Utara.
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Toraja Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

apapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas LKPD Kabupaten Toraja Utara.



2. Untuk menganalisis kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas LKPD Kabupaten Toraja Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh independensi audit internal terhadap terhadap kualitas LKPD Kabupaten Toraja Utara
4. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas LKPD Kabupaten Toraja Utara.
5. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD Kabupaten Toraja Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan mengenai penyusunan laporan keuangan dan memenuhi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan

Motivasi utama tiap aktivitas pengawasan adalah untuk menyakini bahwa manajemen mengoperasikan kegiatannya selaras dengan kepentingan *stakeholders* khususnya stockholders (Rezaee, 2016). Pendekatan memposisikan dewan sebagai pengawas manajemen atau direksi dilandasi oleh teori keagenan yang menempatkan manajemen sebagai ‘agen’ yang perlu diawasi karena memiliki perilaku oportunistik. Berdasarkan hal tersebut, pelaporan keuangan di sektor publik kemudian didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah (eksekutif) untuk bertanggung jawab atas penyajian pelaporan dan pengungkapan semua kegiatan kepada masyarakat yang diwakili oleh legislatif (Mardiasmo, 2009).

Dalam konteks ini, publik sebagai pelaku adalah masyarakat umum yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Berdasarkan prinsip ini, Undang-Undang kemudian mengharuskan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan APBN atau APBD kepada DPR atau DPRD sebagai representasi publik. Pola atau model manajemen akuntabilitas keuangan negara sesuai dengan pola dalam teori keagenan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah agen rakyat melalui perwakilan di DPR atau DPRD.



2.1.2 Teori Kelembagaan

Selain menggunakan teori keagenan seperti yang dijelaskan di atas, penelitian ini juga mengacu pada teori kelembagaan. Teori kelembagaan didasarkan pada gagasan (DiMaggio dan Powell, 1983) bahwa suatu organisasi (dalam hal ini entitas pemerintahan) dibentuk oleh konteks kelembagaan di sekitarnya. Pikiran atau ide yang berpengaruh dilembagakan dan kemudian disahkan secara hukum dan diterima sebagai metode dalam mengoperasikan organisasi. Proses dari legitimasi dilakukan oleh organisasi karena tekanan lingkungan kelembagaan.

DiMaggio & Powell (1983) berpendapat bahwa suatu organisasi terbentuk karena adanya kekuatan dari luar organisasi melalui proses imitasi atau kepatuhan. Organisasi akan berusaha untuk menyesuaikan diri atau disebut isomorfisme (proses menyesuaikan) karena tekanan eksternal. Isomorfisme ini juga dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Tiga proses bagaimana suatu organisasi melakukan isomorfisme menurut DiMaggio dan Powell (1983) termasuk paksaan, imitasi dan normatif. Untuk itu sebagai agen rakyat melalui perwakilan di DPR atau DPRD, lembaga pemerintah daerah dituntut secara tidak langsung untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas secara transparan dan tepat. Variabel penentu kualitas laporan keuangan seperti kepatuhan terhadap keuangan, peraturan manajemen, pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan informasi teknologi adalah bentuk isomorfisme. Sehingga untuk bisa menyajikan LKPD yang

as pemerintah daerah perlu melakukan isomorfisme dan memperhatikan variabel yang mendukung pencapaian tersebut, sebagaimana yang



dikemukakan oleh (Ratmono, 2019; Tambingon dkk., 2018; Anggriawan dan Yudianto, 2018; Sudiarianti, 2015) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD antara lain sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu dijalankan oleh orang-orang dari setiap jenjang organisasi yang diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi (lihat Cherina, 2018):

1. Lingkungan Pengendalian adalah elemen pertama dari struktur pengendalian intern versi COSO. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut.



2. Penilaian Risiko adalah pelaksanaan untuk menganalisa tingkat resiko, mempertimbangkan resiko tersebut dalam tingkat bahaya tertentu dan mengevaluasi apakah sumber bahaya tersebut dapat dikendalikan secara memadai serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikannya.
3. Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko. Pada kegiatan ini dilakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan tindakan mengatasi risiko tersebut telah dilaksanakan dengan efektif.
4. Informasi dan komunikasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
5. Pemantauan adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.



menurut PP Nomor 8 Tahun 2006, sistem pengendalian intern adalah suatu yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan

keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam PP Nomor 60 tahun 2008 dimensi serta indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian intern dapat dilihat dari Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Zuliatri (2012) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi dibidangnya dan memiliki jiwa berkompetensi yang sportif. Sumber daya manusia yang profesional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusun laporan keuangan yang berkualitas.

Azhar (2010) mendefinisikan sumber daya manusia merupakan pilar utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan



bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

Hutapea dan Nurianna (2008) mengemukakan standar kompetensi mencakup tiga aspek yang selanjutnya menjadi indikator kompetensi yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan (*knowledge*), yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu mengetahui dan memahami pengetahuan dibidangna masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawab, mengetahui pengetahuan yang berhubungan denga peraturan, prosedur dan teknik.
2. Keterampilan (*skills*), kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan maupun secara lisan,
3. Sikap (*attitude*), memiliki kemampuan dalam berkeativitas dalam bekrja, semangat kerja yang tinggi dan memiliki kemampuan dalam perencanaan.

Kompetensi merupakan *knowledge*, *skill*, dan *attitude* cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.



2.1.5 Independensi Audit Internal

Menurut *Institute of Internal Auditor* (IIA, 2012) independensi auditor internal adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan audit internal untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai audit internal agar mampu mempertanggungjawabkan pelaporan secara profesional dan tidak bias. Ancaman terhadap independensi harus dikelola pada individu tingkat auditor fungsional dan organisasi.

Selanjutnya Pickett (2010) menyatakan independensi auditor internal merupakan kebebasan dari kondisi yang mengancam aktivitas audit internal dipertanggungjawabkan secara objektif. Sejalan pernyataan Hiro (2006) menyatakan bahwa independensi auditor internal adalah bebas dari situasi yang mengancam objektivitas baik secara individu maupun kelompok.

Independensi audit internal menentukan kualitas pelaporan keuangan. Kualitas audit adalah fungsi dari ruang lingkup pelayanan yang diberikan dan sejauh mana audit telah direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan (Mihret dan Yismaw, 2007). Selanjutnya Sawyer dkk. (2003) mengatakan bahwa audit internal mencerminkan nilai organisasi. Kualitas audit ditentukan oleh kemampuan melaporkan temuan dan rekomendasi untuk perbaikan laporan keuangan (Mihret dan Yismaw, 2007).

2.1.6 Komitmen Organisasi

Akuntabilitas dan transparansi keuangan merupakan faktor penting dalam pelayanan publik. Akuntabilitas keuangan merupakan penyediaan informasi dan laporan tentang kegiatan atau kinerja keuangan kepada seluruh pemangku organisasi. Hak publik adalah hak untuk tahu, hak untuk mendapat informasi dan



hak untuk didengar. Komitmen organisasi menunjukkan kekuatan individu dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam bagian organisasi (Mowday dkk., 1989). Meyer dkk., (1997) menyajikan tiga komponen komitmen organisasi antara lain komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif. Ketiga komponen tersebut menggambarkan tekad individu dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Komitmen terhadap tujuan anggaran dalam organisasi didefinisikan sebagai tekad untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas dan dilakukan secara berkelanjutan (lihat Locke dan Latham, 1990). Definisi ini digunakan oleh penelitian sebelumnya seperti (Maiga dan Jacob, 2005) untuk menggambarkan pentingnya variabel komitmen organisasi dalam pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja individu ditentukan oleh komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai. Menurut Locke dkk. (1988) komitmen organisasi dipengaruhi oleh tiga hal, antara lain (1) faktor eksternal yang terdiri dari otoritas, faktor teman sebaya, dan penghargaan eksternal, (2) Faktor interaktif yang terdiri dari partisipasi dan persaingan dan (3) faktor internal yang terdiri dari harapan dan penghargaan internal.

2.1.7 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menegaskan bahwa teknologi informasi adalah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk



pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

Tingginya biaya tenaga kerja manusia yang diperlukan dalam pemrosesan data membuat pemrosesan secara manual kurang efektif jika ditinjau dari sisi volume dan biaya pemrosesan. Pemrosesan secara manual memiliki biaya yang stabil pada angka yang cukup tinggi. Sementara dengan menggunakan mesin, meski investasi awal lebih besar biayanya, namun pada perkembangannya akan dapat mengurangi biaya pemrosesan dengan tetap menjaga volume. Sementara pengolahan data dengan menggunakan komputer dapat terus mengurangi biaya-biaya pada posisi yang paling rendah dibandingkan dengan metoda pengolahan yang lain.

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian atas keakurasian data.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses

unan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*governance*). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk



mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan Informasi Keuangan kepada pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Konstruksi pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur dengan indikator:

1. Perangkat

Elemen atau pondasi penting untuk membangun sebuah komputer yang memiliki fungsionalitas dan berguna bagi manusia. Merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung hardware dan sistem jaringan internet.

- a. *Hardware*, merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.
- b. Jaringan internet, sebuah jaringan yang terkait dalam lingkup global dan memfasilitasi komunikasi layanan data.

2. Pengelolaan Data Keuangan

Basis teknologi informasi yang didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan referensi, serta proses komunikasi data atau informasi keuangan daerah. Merupakan indikator untuk menggambarkan:



- a. Komputersasi proses akuntansi, sebuah sistem akuntansi dimana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan

dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan.

- b. *Software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengolah data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi, menghasilkan laporan akuntansi dan manajerial berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi.

3. Perawatan

Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan.

Merupakan indikator untuk menggambarkan:

- a. Pemeliharaan peralatan, melakukan pemeliharaan peralatan secara teratur.
- b. Perbaikan peralatan yang rusak atau hilang, melakukan pendataan dan perbaikan pada peralatan yang rusak atau hilang.

2.1.8 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam sistem akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada empat unsur yang



merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

1. Dapat dipahami

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna informasi. Begitu juga dengan laporan keuangan juga harus disajikan dengan baik dan sesuai standar agar pengguna informasi laporan keuangan tersebut bisa dengan mudah memahami laporan keuangan tersebut.

2. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, yaitu dengan cara dapat berguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu. Relevansi informasi bermanfaat dalam memprediksi atau meramalkan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*), yang saling berkaitan satu sama lain.

3. Keandalan (*Reliability*)

Laporan keuangan yang baik adalah jika memberikan informasi yang reliabel. Informasi reliabel jika tidak memiliki atau bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan penyajiannya dengan jujur (*faithful representation*). Keandalan informasi juga akan mempengaruhi relevansi, karena jika informasi yang disajikan andal maka

akan semakin relevan. Begitu juga jika informasi tersebut tidak andal maka akan berpotensi besar untuk menyesatkan pengguna informasinya.



4. Dapat dibandingkan

Pengguna laporan keuangan harus bisa membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Ratmono (2019) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Hipotesis penelitian terutama didasarkan pada teori keagenan dan kelembagaan. Dengan menggunakan metode *Structural Equation Model-Partial Least Square* (SEM-PLS) dalam pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan manajemen keuangan negara, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan informasi teknologi memiliki hubungan positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Temuan ini menunjukkan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam peningkatan akuntabilitas keuangan negara.

Tambingon dkk., (2018) mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Faktor-faktor yang diamati antara lain komitmen organisasi, independensi audit internal, dan sistem informasi akuntansi. Sampel diperoleh secara *random*. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 66 unit pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi, independensi audit internal



memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Selanjutnya ditemukan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi memiliki implikasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian Anggriawan dan Yudianto (2018) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode dan data kualitatif dilengkapi dengan teknik wawancara dan laporan kepada 17 responden, yang merupakan kepala bagian keuangan di Unit Kerja Daerah Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung Barat antara lain penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan peran auditor internal.

Sudiarianti (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dalam penerapan sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

